

BAB I

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KONFLIK SOSIAL DI KOTA TIMIKA PAPUA

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang plural, yang artinya lebih dari satu ciri khas bangsa antara lain memiliki keanekaragaman agama, suku, budaya, ras, dan adat. Keanekaragaman itu dijamin oleh asas bhinneka tunggal ika (berbeda-beda tetapi tetap satu). Keanekaragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya dan gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa, Pemerintah harus bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.

Keanekaragaman itu dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Indonesia merupakan negara kepulauan karena kondisi dari Indonesia sendiri, yaitu Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau atau sekitar 18.108 pulau (termasuk sejumlah 9.638 pulau tanpa nama dan 6.000 pulau yang tak berpenguni) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, hal ini juga

dikarenakan letak Indonesia yang berada di tengah-tengah perairan yang luas dan diapit oleh dua samudera, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dapat dikatakan pula bahwa Indonesia memiliki keunikan sendiri dibandingkan negara lain, dimana Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan atau pulau-pulau yang terpisah oleh laut¹. Indonesia mempunyai lima pulau besar yaitu pulau Sumatra, pulau Jawa, pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan pulau Papua. Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau tersebut mengakibatkan beragam suku dan adat, yaitu salah satunya di Pulau Papua yang diperkirakan memiliki jumlah suku-suku sebanyak 319 suku yang tersebar di pulau Papua².

Kota Timika yang merupakan bagian dari kabupaten Mimika yang termasuk dalam provinsi Papua memiliki tujuh (7) suku yang mendiami kota Timika Papua yaitu suku Amongme, suku Kamoro, suku Nduga, suku Dani, suku Moni, suku Mee, dan suku Damal. Suku Amongme adalah salah satu suku yang tinggal di dataran tinggi Timika, suku Amongme memiliki tradisi pertanian berpindah dan berburu, selain itu juga, suku Amongme mendiami beberapa lembah luas di kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak Jaya antara gunung-gunung tinggi yaitu lembah Tsinga, lembah Hoeya, dan lembah Noema serta lembah-lembah kecil seperti lembah Bella, Alama, Aroanop, dan Wa.³

¹ Intan Nur Fadilah, Mengapa Negara Indonesia disebut Negara Kepulauan.

<http://gurupintar.com/threads/mengapa-negara-indonesia-disebut-negara-kepulauan.2749/>, diakses tanggal 5 September 2016, jam 13:42

² Papua Go Id, Suku Bangsa Asli Papua Menurut Urutan Abjad (Hasil Sensus Penduduk 2000).

<https://papua.go.id/bps/LEFT%20FRAME%20WEB%202005/PENDUDUK/SUKU%20BANGSA%20ASLI%20PAPUA%20MENURUT%20URUTAN%20ABJAD.htm>, diakses tanggal 5 September 2016, jam 14:16

³ Ruth Ricky, Suku Amongme.

Suku Kamoro adalah kelompok adat yang mendiami sepanjang 300 km pesisir selatan Timika, di kawasan ujung timur Indonesia yang masih memiliki hubungan saudara dengan suku asmat dari segi bahasa yang tinggal di sebelah timur yang sangat terkenal karena kesenian mereka. Jumlah penduduk Kamoro sekitar 18.000 jiwa terbagi dalam kurang lebih 40 kampung, sekitar 1.500 penduduk Kamoro tinggal di berbagai lokasi transmigrasi sekitar Kota Timika.⁴

Suku Nduga adalah salah satu suku yang berdomisili di daerah pegunungan tengah papua yang tinggal di wilayah kabupaten Nduga. Suku Dani adalah Suku yang bermukim di lembah Baliem (138030''– 139030'' BT dan 3400'' – 420''LS). Lembah Papua yang dimaksud berada di tengah-tengah pegunungan Jaya Wijaya pada ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut, Lembah Baliem memiliki luas sekitar 1200 km². Suku MEE adalah komunitas masyarakat tertentu yang hidup di pegunungan tengah Papua khususnya Kabupaten Paniai sekarang telah terbagi menjadi pemekaran baru di beberapa kabupaten daerah yakni Dogiyai, Deiya, dan Intanjaya. Suku Damal merupakan suku yang berasal dari daerah Mepingama Lembah Baliem Wamena, adalah salah satu suku di pegunungan Papua.⁵ Suku moni adalah suku asli yang berada

<https://ruthrickydc.wordpress.com/2015/01/26/suku-amungme/>, diakses tanggal 5 September 2016, jam 15:52

⁴ LPMak, Suku Kamoro.

<http://www.lpmak.org/about-us-2/649-2/kamoro/>, diakses tanggal 5 September 2016, jam 15:54

⁵ Ayu Ristianti, Suku Timika.

<https://id.scribd.com/doc/197567137/Suku-Timika>, diakses tanggal 5 September 2016, jam 16:30

di sebelah Kabupaten Mimika merupakan suku asli pemilik wilayah di sana yang bertetangga di sebelah timur yaitu suku Kamoro.⁶

Keanekaragaman yang ada di Pulau Papua tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan antar agama, ras, suku, budaya. Salah satu perselisihan yang sering terjadi di Pulau Papua khususnya di kota Timika adalah perselisihan atau konflik sosial antar suku, sebagai salah satu contohnya konflik suku antara suku Dani dan suku Moni yang terjadi tahun 2016 yang diakibatkan karena perebutan lahan tanah, akibat perang antar suku ini, belasan orang dari ke-2 belah pihak mengalami luka-luka. Mereka dievakuasi ke rumah sakit yang berbeda di Timika, sebenarnya akibat bentrokan yang sudah berlangsung sejak 3 bulan terakhir belasan orang meninggal dunia dan ratusan orang dari ke-2 kubu mengalami luka-luka. Konflik suku yang terjadi dalam masyarakat mengakibatkan adanya timbul kerugian seperti merasa kurang aman, segala aktifitas pertokoan, aktifitas perkantoran menjadiah lumpuh. Larangan terjadinya konflik sosial atau perang antar suku tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, namun pada saat ini sanksi untuk pelaku Konflik sosial belum ada sehingga memungkinkan terjadinya konflik sosial.

⁶ Erick Papua, Konflik Suku Dani-Moni.

http://www.kompasiana.com/keriting/konflik-suku-dani-moni-konflik-paling-lucu-di-papua_54f8020ca33311641e8b4fe3, diakses tanggal 5 September 2016, jam 18:25

Penanggulangan konflik sosial (perang suku) yang ada di Kota Timika dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan fungsi, tujuan dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, didalam Pasal 2 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya kepolisian dan pemerintah setempat dalam menyelesaikan perang suku yang terjadi di Timika biasanya dinilai kurang optimal oleh masyarakat karena perang suku itu sering terulang kembali. Hal inilah yang melatar belakangi penulisan skripsi dengan judul Upaya Kepolisian Dalam menanggulangi Perang suku di Timika Papua.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah upaya kepolisian dalam menanggulangi konflik sosial di kota Timika Papua sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Apa saja kendala kepolisian dalam menanggulangi konflik sosial di kota Timika Papua?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Polres Mimika dalam menanggulangi konflik sosial di kota Timika Papua sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami Polres Mimika dalam menanggulangi konflik sosial di kota Timika Papua.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelien ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dibidang hukum pidana dalam upaya Polres Mimika dalam menanggulangi Perang antar suku yang dilakukan oleh kelompok masyarakat antar suku beserta kendala yang dihadapi dalam mengatasi masalah tersebut.

2. Praktis

Polres Mimika Papua, agar dapat menjalankan tugas dalam rangka menanggulangi Perang antar suku yang dilakukan oleh masyarakat antar suku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya tugas dan fungsi dari kepolisian.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian atau skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Perang Suku di Kota Timika Papua” merupakan karya asli bukan plagiasi. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Perang Suku di Kota Timika beserta kendala yang dihadapi.

Adapun skripsi yang mirip dengan yang dikaji penulis:

1. Judul, jurnalisme damai dalam pemberitaan kerusuhan Temanggung (analisis isi kuantitatif di harian suara merdeka pada bulan Februari-juli 2011), yang di susun oleh Ratna Ayu Novita Br Hutagalung, 070903226, Rumusan masalahnya adalah apakah harian suara merdeka menggunakan pendekatan jurnalisme damai dalam pemberitaan kerusuhan temanggung pada bulan Februari-juli 2011. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran apakah harian suara merdeka menggunakan pendekatan jurnalisme damai dalam pemberitaan kerusuhan pada bulan Februari-juli 2011.

Hasil penelitian adalah memperdalam salah satu metode penelitian komunikasi analisis isi yang di kaitkan dengan fenomena yang berkembang di masyarakat yang berhubungan dengan dunia pers dan jurnalistik, Memberi pengetahuan lebih mengenai pendekatan jurnalisme damai dalam kaitannya dengan peliputan peristiwa konflik.

2. Judul, Berita konflik di Lampung selatan dalam media online (studi analisis isi kuantitatif penerapan jurnalisme damai pemberitaan konflik di lampung selatan dalam tribun Lampung online terbitan 28 Oktober sampai dengan 5 November 2012), yang disusun oleh Gumay Azmi Addy Pratama, 070903233. Rumusan masalahnya adalah apakah pemberitaan konflik di Lampung Selatan dalam tribun Lampung online terbitan 28 Oktober sampai dengan 5 November 2012 sudah menerapkan jurnalisme damai. Tujuan penelitian untuk mengetahui pemberitaan konflik di Lampung Selatan dalam tribun Lampung online terbitan 28 Oktober sampai dengan 5 November 2012 sudah menerapkan jurnalisme damai.

Hasil penelitian adalah untuk menjadi referensi bagi penelitian berikutnya melalui upaya mengkaji, menerapkan, menguji, menjelaskan atau membentuk teori-teori, konsep maupun hipotesis terutama dalam pemberitaan di media masa.

F. Batasan Konsep

Beberapa konsep yang perlu diberikan pembatasan sebagai berikut :

1. Upaya adalah usaha ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya⁷.

⁷ <http://kbbi.web.id>, diakses tanggal 30 mei, jam 22.05

2. Kepolisian menurut undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undang.
3. Menurut Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 1 ayat 1 tentang penanganan konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik, dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
4. Menaggulangi adalah menghadapi, mengatasi⁸.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di lakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berupa norma hukum peraturan perundang-undangan yang dikaji vertikal dan horizontal, yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi perang suku di kota Timika Papua beserta kendala yang dihadapi. Upaya kepolisian dalam menanggulangi konflik sosial di kota timika yaitu dengan cara merangkul

⁸ <http://kbbi.web.id>, diakses tanggal 30 mei 2017, jam 22.07

pemuka agama seperti Pendeta dan Pastur karena masyarakat yang berada di Kwamki Narama bergama kristen dan katolik dan kepala suku dari masing-masing suku yang bertikai, karena setiap suku-suku yang berada di Kwamki Narama masih menghimbau atau mendengar dari masing-masing kepala suku adat, serta melibatkan pemerintah daerah seperti DPRD dan KESBANGPOL (kesatuan bangsa dan politik) dan kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Mimika adalah kurangnya sarana dan prasarana serta perbedaan bahasa, bahasa yang digunakan bukanlah bahasa Indonesia melainkan bahasa dari masing-masing suku yang bertikai.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder yang bahan primer dan bahan hukum sekunder

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial.
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

5) Perkap Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

6) Perkap Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial

7) Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 Tentang Fungsi Kepolisian

8) Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000 Tentang Peran Kepolisian

b. Bahan Hukum Sekunder adalah berupa bahan hukum yang meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, hasil penelitian, internet, doktrin, fakta hukum, dan narasumber dari Kepolisian Resor Mimika yaitu Kopol Muh. Nur Bakti, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Sumber Daya(Kabag Sumda) yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus besar bahasa indonesia yang digunakan untuk memeberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, website, pendapat hukum yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan hukum yang meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, dan narasumber dari dari Kepolisian Resor Mimika yaitu Kopol Muh. Nur Bakti, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Sumber Daya(Kabag Sumda) yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

c. Analisis Data

Metode analisi data yang digunakan adalah dengan cara analisis secara kualitatif yaitu analisi yang digunakan dengan cara mengumpulkan data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi satu dan dideskripsikan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan metode berpikir deduksi yaitu metode penarikan yang ditarik dari peraturan hukum yang umum kedalam kesimpulan hukum yang lebih khusus.

H. Sistematika Penulisan

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

2. BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua dan hasil penelitian.

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

- a. Kepolisian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1'' Kepolisian adalah hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Tugas Kepolisian Republik Indonesia(POLRI)

Tugas pokok kepolisian sebagai mana diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan Hukum
- c. Memberikan perlindungan pengayoman, pelayanan kepada masyarakat

3. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian menurut Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 4

4. Wewenang Kepolisian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5

5. Peran Kepolisian Republik Indonesia

Peran kepolisian menurut ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000 dibagi menjadi dua yakni peran pokok dan peran khusus.

B. Tinjauan Umum tentang Konflik Sosial

1. Pengertian Konflik Sosial

Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa latin “ con “ yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Sosial

- a. Perbedaan Antar perorangan
- b. Perbedaan kebudayaan
- c. Bentrokan Kepentingan
- d. Perubahan sosial yang terlalu cepat didalam Masyarakat

3. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial

Pasal 1 angka 14 Undang-undang No. 7 Tahun 2012 mengatur tentang bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri.

4. Dampak-dampak terjadinya Konflik Sosial

Dampak dari konflik sosial ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif

C. Tinjauan Umum Mengenai Konflik Antar Suku di Kota Timika Papua

1. Latar Belakang Terjadinya konflik Antar Suku di Kota Timika Papua
2. Kronologi Penyebab Konflik Sosial Antara Suku Dani Dan Suku Damal di Kota Timika Papua
3. Upaya-upaya Kepolisian Daerah Mimika Dalam Menangani Konflik Antar Suku di Kota Timika Papua
 - a. Tugas Polisi Dalam Menanggulangi Konflik Sosial
 - b. Upaya Preventif atau Pencegahan
 - c Upaya Represif atau Penindakan
 - d. Kendala-kendala Kepolisian Daerah Kota Timika dalam Menangani Konflik Antar Suku di Kota Timika Papua

3. BAB III. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian.